

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 71 TAHUN
2010 TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN
PUSAT STATISTIK BANYUASIN
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi**



Diajukan Oleh :

JIMMY ALMUHZANI

16.01.12.01.29

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : JIMMY ALMUHZANI
Nomor Pokok/NIM : 16.01.12.01.29
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Analisis Laporan Keuangan
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PEMERINTAH NO 71 TAHUN 2010 TERHADAP
AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN
PUSAT STATISTIK BANYUASIN

Pembimbing Skripsi

Tanggal 17/10/2020 Pembimbing I: Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE., MM
NIDN : 0016035101

Tanggal 17/10/2020 Pembimbing II: Firmansyah Arifin, SE.MM.Ak.CA
NIDN : 0211058902

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi,


DR. MSY MIKIAL, SE, M.Si, Ak.CA, CSRS
NIDN : 0221076502

223 / PS / DFE / 2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jimmy Almuhzani

NPM : 1601120129

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, 23 September 2020


Jimmy Almuhzani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ❖ Siap tidak siap mau tidak mau kamu akan melewati semua proses dalam kehidupan. Jadi sebagaimana pun keadaanmu sekarang jangan pernah kamu merasa gagal, karna untuk bisa diposisi saat ini tidaklah mudah, hargailah setiap proses dalam hidupmu.
- ❖ Bidangmu bukan salah, hanya saja kurang luas.

Kupersembahkan kepada :

- Allah S.W.T
- Ayah Dan Ibuku Tercinta
- Para Dosen Dan Pembimbing, Yang
Kuhormati
- Saudariku
- Pendampingku
- Teman-Temanku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Banyuasin” ini dapat terselesaikan, sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan sampai akhir zaman.

Penelitian ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan yang mungkin akan ditemukan. Oleh karena itu penulis mengharapkan segenap kritikan, masukan, saran, dan koreksi yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini untuk kedepannya. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat memberikan dorongan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan penelitian serupa di kemudian hari.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak. CA, CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Paembang.
2. Ibu Meti Zuliyana, SE, M.Si. Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
3. Bapak Prof.Dr.H.Sulbahri Madjir, SE,.,MM selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah memberikan pengarahan selama penyelesaian skripsi dan memberikan bimbingan guna penyelesaian skripsi.

4. Bapak Firmansyah Arifin, SE.MM.Ak.CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan selama penyelesaian skripsi dan memberikan bimbingan guna penyelesaian skripsi.
 5. Ibu Hj. Dwi Septa Aryani, SE, M.Si, Ak, CA Selaku Dosen Akademik.
 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
 7. Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Banyuasin beserta staf-staf yang telah bersedia memberikan keterangan dan data selama proses pembuatan skripsi.
 8. Kedua orang tua penulis, Ayah (Zainal Abidin) dan Ibu (Nani Suryani) terimakasih karena telah memberikan kasih sayang, semangat, cinta, perhatian, pengorbanan, dan tak pernah berhenti mendoakan ku.
 9. Saudariku (Melly Meizalina S.E) tersayang yang telah mendukung dan menyemangatiku.
 10. Kekasihku (Dwi Rika Septiani) tercinta yang telah mendukungku baik secara emosional dan material.
 11. Teman-teman seperjuangan (Panca Anugrah, Noel Yobel, Yani Yanto, Nobi Gusti Randa, M.Fajri) angkatan tahun 2016 di Universitas Tridianti Palembang.
- Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita mahasiswa-mahasiswi Universitas Tridianti Palembang dan khususnya untuk penulis.

Palembang, September 2020
Penulis

Jimmy Almuhezani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
RIWAYAT HIDUP	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kajian Teoritis	7
2.1.1. Implementasi dan PP Nomor 71 Tahun 2010	7
2.1.1.1. Pengertian Implementasi	7
2.1.1.2. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010.....	8
2.1.1.3. Laporan Neraca.....	13
2.1.1.4. Laporan Laba Rugi	17

2.1.1.5. Laporan Arus Kas	18
2.1.1.6. Catatan Atas Laporan Keuangan	22
2.1.2. Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan	23
2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas di Laporan Keuangan..	23
2.1.2.2 Tujuan Akuntabilitas di Laporan Keuangan	24
2.1.2.3 Manfaat Akuntabilitas di Laporan Keuangan.....	25
2.2. Penelitian yang Relevan	25
2.3. Kerangka Berfikir	28

BABIII METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.1.1. Tempat Penelitian	30
3.1.2. Waktu Penelitian	30
3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	30
3.2.1. Sumber Data	30
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data	31
3.3. Populasi, Sampel dan Sampling	32
3.3.1. Populasi	32
3.3.2. Sampel	32
3.3.3. Teknik Sampling	32
3.4. Rancangan Penelitian	32
3.5. Variabel dan Definisi Operasional	32
3.5.1 Variable.....	34
3.5.2 Definisi Operasional	34

3.6. Instrumen Penelitian	36
3.7. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	37
4.1.1. Sejarah Singkat BPS Banyuasin	37
4.1.2. Visi Misi BPS Banyuasin	40
4.1.2.1. Visi	40
4.1.2.2. Misi.....	40
4.1.3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	41
4.1.4. Fungsi yang Terkait Pada BPS Banyuasin	42
4.1.5. SAP yang Diterapkan BPS Banyuasin.....	39
4.2. Pembahasan.....	51
4.2.1. Implementasi PP 71 Tahun 2010 Terhadap ALK BPSB..	69
4.2.2. Analisis yang Ditenerapkan SAP Berbasis Akrua.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	76
5.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Lain yang Relevan	27
3.5.2 Variabel dan Definisi Operasional	35
4.1.5.1 Laporan Realisasi Anggaran 2017	46
4.1.5.2 Neraca 2017	45
4.1.5.3 Laporan Operasional 2017	48
4.1.5.4 Laporan Perubahan Ekuitas 2017.....	50
4.1.5.5 Laporan Realisasi Anggaran 2018	51
4.1.5.6 Neraca 2018	52
4.1.5.7 Laporan Operasional 2018	53
4.1.5.8 Laporan Perubahan Ekuitas 2018.....	54
4.1.5.9 Laporan Realisasi Anggaran Perbandingan 2019	56
4.1.5.10 Neraca Perbandingan 2019	57
4.1.5.11 Laporan Operasional Perbandingan 2019	58
4.1.5.12 Laporan Perubahan Ekuitas Perbandingan 2019.....	60
a.5.1 Perkembangan Nilai BMN	66
a.5.2 Informasi Pengelolaan BMN	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.3 Kerangka Pemikiran	29
4.1 Struktur Organisasi BPS Banyuasin	42

ABSTRAK

JIMMY ALMUHZANI, Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Banyuasin. (Dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE,MM dan Bapak Firmansyah Arifin, SE.MM.Ak.CA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Laporan Keuangan terhadap Badan Pusat Statistik Banyuasin, serta *faktor-faktor* yang mempengaruhinya, yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, . Populasi penelitian ini adalah seluruh Staf dan Jajaran di BPS Banyuasin. Sampel penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan penulis yakni: dalam Implementasi Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Banyuasin Telah Sesuai dengan Pengelolaan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Banyuasin dan sudah menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Yaitu Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dapat disimpulkan bahwa:

1). Laporan Keuangan ini pun telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). 2). Kesiapan Badan Pusat Statistik khususnya BPS Kabupaten Banyuasin dalam melakukan Implementasi SAP berbasis akrual sebagai wujud kepatuhan terhadap pemerintah yang berlaku saat ini. Untuk Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 Badan Pusat Statistik Banyuasin telah mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

ABSTRACT

JIMMY ALMUHZANI, Implementation of government regulation No. 71 in 2010 on accountability for the financial report for the development of the target. (Under the guidance of Mr. Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE.,MM and Mr. Firmansyah Arifin, SE.MM.Ak.CA)

The study aims to know and analyze the accounting of the financial report's infallibility to Badan Pusat Statistik Banyuasin, as well as factors that influence it, that includes: the budget realization report, balance sheet, operational report, change of equity report. The research population is the entire staff and ranks in the BPS. This sample is selectively sampling. The research method used in this study is a qualitative study method. Data collection techniques are done with interviews and documenting.

Based on analysis by the author: the implementation of government regulation 71 in 2010 against the liabilities of the financial report for Banyuasin already consistent with the management of the financial report for Banyuasin, and already using the established standard of government regulation no.71 in 2010 on government accounting standards (SAP) and can conclude that:

1). This account has been prepared and presented on an accrual basis so that it will be able to provide transparent, accurate and accountable financial information. The financial report is also intended to provide information for management in decision making in an effort to realize good governance. 2) Preparing BPS in doing of implementation of the SAP based on accrual is obedience on regulation's governance. To the budget of 2017 until 2019, BPS has been got the predicate unqualified opinion from (BPK)

Keywords : Government Regulations No. 71 in 2010, Federal of financial report

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Jimmy Almuhezani, dilahirkan di Palembang pada Tanggal 16 Desember 1996 dari ayah yang bernama Zainal Abidin dan Ibu yang bernama Nani Suryani, anak kedua dari dua bersaudara.

Sekolah dasar Negeri 05 Palembang diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri 41 Palembang pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas/Sederajat YPI Tunas Bangsa Palembang diselesaikan pada tahun 2015, dan selanjutnya masuk Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, September 2020

Jimmy Almuhezani

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi salah satu reformasi yang dilakukan adalah peralihan akuntansi pemerintah yang berbasis kas menjadi basis akrual. Hal ini mengharuskan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu kunci penting dalam pengelolaan keuangan negara tersebut adalah terkait dengan sistem akuntansi pemerintahan indonesia yaitu dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.(Ribo,2013:188).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di indonesia. Standar tersebut berisi Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan. Berlakunya peraturan pemerintahan nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa

perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menjadikan informasi yang paling komprehensif, karena seluruh arus sumber daya dicatat. *(Harahap, 2015:105)*

Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas. Untuk mewujudkannya diperlukan aparat pemerintah yang mampu menerapkan penggunaan basis akrual tersebut. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi aparat pemerintah yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan. Selanjutnya infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi. Selain itu, dalam suatu organisasi pastinya memiliki komitmen yang berbeda yang akan berdampak dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan. *(Rudianto, 2013:189)*

Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.(Kartika Sari,2014:60)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 Oktober 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (good goverment), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan pengelolaan laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.(Kountur dan Untu,2015:101)

Di Indonesia Implementasi laporan keuangan memiliki Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan. Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota maupun Propinsi dalam mengimplementasikan dalam penyajian laporan keuangan berbasis akrual pada objek penelitian yang penulis lakukan, yakni di Badan Pusat Statistik Banyuasin. (*Badan Pusat Statistik, 2020*)

Badan Pusat Statistik Banyuasin merupakan badan pemerintah yang harus melaksanakan SAP berbasis akrual. Sebagai badan pemerintah, Badan Pusat Statistik Banyuasin dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan belanja negara/daerah (APBN/APBD). Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik Banyuasin wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran negara dan daerah yang diperolehnya. Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Banyuasin harus berlandaskan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dengan melaksanan sesuai dengan Peraturan tersebut, apakah laporan keuangan tersebut sudah memenuhi akuntabilitas. (*Badan Pusat Statistik, 2020*)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul untuk Skripsi ini dengan judul

“ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK BANYUASIN”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Banyuasin?

1.3 . Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Banyuasin.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis melakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan:

1. Bagi mahasiswa

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengalaman penulis dalam dunia kerja khususnya di bidang Akuntansi, dan tak terkecuali untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi kerja suatu bidang keuangan dalam melaksanakan masing-masing tugas dan wewenangnya. Serta untuk menjadi bekal

kepada penulis Bagaimana cara bersosialisasi antara sesama perusahaan dengan baik dan dapat mengetahui apa saja produk-produk yang telah dibuat oleh Akuntan tersebut.

2. Bagi Institut

Memberikan sumbangan wacana pemikiran serta motivasi kepada masyarakat maupun lembaga yang terkait khususnya pada BPS (Badan Pusat Statistik) Banyuasin.

3. Bagi BPS (Badan Pusat Statistik) Banyuasin

Untuk mengetahui sumbangan fikiran dan masukan dari mahasiswa khususnya pada laporan keuangan pada badan pusat statistik dibanyuasin menurut peraturan pemerintah tentang perundang undangan nomor 71 tahun 2010, apabila ada kekurangan atau sistem nya yang kurang baik sehingga dapat menyempurnakan prosedur sesuai peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Hafiz, T. (2012). *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pendekatan Teknis Sesuai PP No.71/2010*. Bandung: Alfabeta.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Kasmir. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Cetakan Pertama.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha Heribertus, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munawir. (2012). *Analisis Informasi Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nordiawan, D. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rasdianto dan Erlina. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual) Edisi Pertama*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiyati, (2017). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: PT. Gramedia Asri Media.
- Suwanda, D. (2014). *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman pada SAP*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thompson, H. (2011). *Transitionform Cash to Accrual Accounting Project*. Berbados: Public Expenditure Management.

Tim Penyusunan. (2018). *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Edisi Pertama*. Palembang: Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti.

Rusdianto. (2013). *Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.

Sinaga, R. (2013). *Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

JURNAL DAN SKRIPSI

Aliyah dan Nahar. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. 33.

Astuti, Y. L. (2017). *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Kabupaten Karanganyar*, 45.

Kodri. (2017). *Analisis Tingkat Pemahaman Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Kantor Camat Lalan Kabupaten Musi Banyuasin*, 16.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. (2016). Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rahayu. (2014). *Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual di Jombang*.

WEBSITE

www.banyuasinkab.bps.go.id